

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, I. (2006). *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: SalembaEmpat.
- <https://surabayakota.bps.go.id/>
- Kusumawardani. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Semarang: Fakultas Ekonomi UNNES. ISSN 2252-6765.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta.
- Maulina A. , Alkamal M., dan Fahira S. N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390-399.
- Mulyani, S. dan H. Wibowo. 2017. Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue* dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *Kompartemen* 15(1): 57-66.
- Patrick, P. A. 2007. *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government*. Unpublished Ph.D Dissertation. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rahma P. A. R. (2020). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Aslidaerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(8), 1-19.
- Rizki Hamdani, 2017. “ Pengaruh Ukuran Pemerintah, Kemakmuran Pemerintah, Ukuran Legislatif, Dana Transfer Pemerintah Pusat Dan

Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia". Skripsi. Medan: Universitas Sumetara Utara.

Sarawati D. dan Rioni S. Y. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.

Sari I. P. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pad, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *JOM Fekon*, 3(1), 679-692.

Sari P. dan Mustanda K. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen*, 8(8), 4759-4787.

Sugiyono. (2018a). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

Cv. Alfabeta. Sugiyono. (2018b). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.

Bandung: Alfabeta Sugiarto. 2015. *Metode Statistika Bisnis*. Matana Publishing. Tangerang

Sumarjo, H. (2010). *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia)*. (Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta).

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah